



PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JLN. GUNUNG TUA/LANGGA PAYUNG KM.5 (Kompleks Gor)

Telp. (0635) 510489 E-mail : bpbdpaluta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Rancangan Rencana Kerja 2025 ini.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sehingga penyusunan Perubahan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Gunung tua, 28 Juli 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.198110092000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai triwulan II tahun Berjalan	6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	11
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	13
3.3. Program dan Kegiatan.....	16
 BAB IV PENUTUP	18

.....Halaman

Tabel . 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara	6
Tabel . 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	15
Tabel . 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	20

DAFTAR ISI

Tabel . 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepengtingan Tahun 2025.....	22
Tabel 3.1	Prioritas Nasional dan Program Priorotas dalam Rancangan RKP Tahun 2025.....	23
Tabel . 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025.....	27
Tabel . 3.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025.....	27
Tabel . 3.3	Rumusan perubahan Rencana Program dan Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	33

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, Perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan dokumen perencanaan untuk semester II tahun berjalan, secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaan difokuskan pada bulan oktober, november dan desember tahun 2025, rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai tindak lanjut dari rencana kerja tahun 2025 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini, agar pelayanan dapat maksimal/berjalan lancar.

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD perubahan.

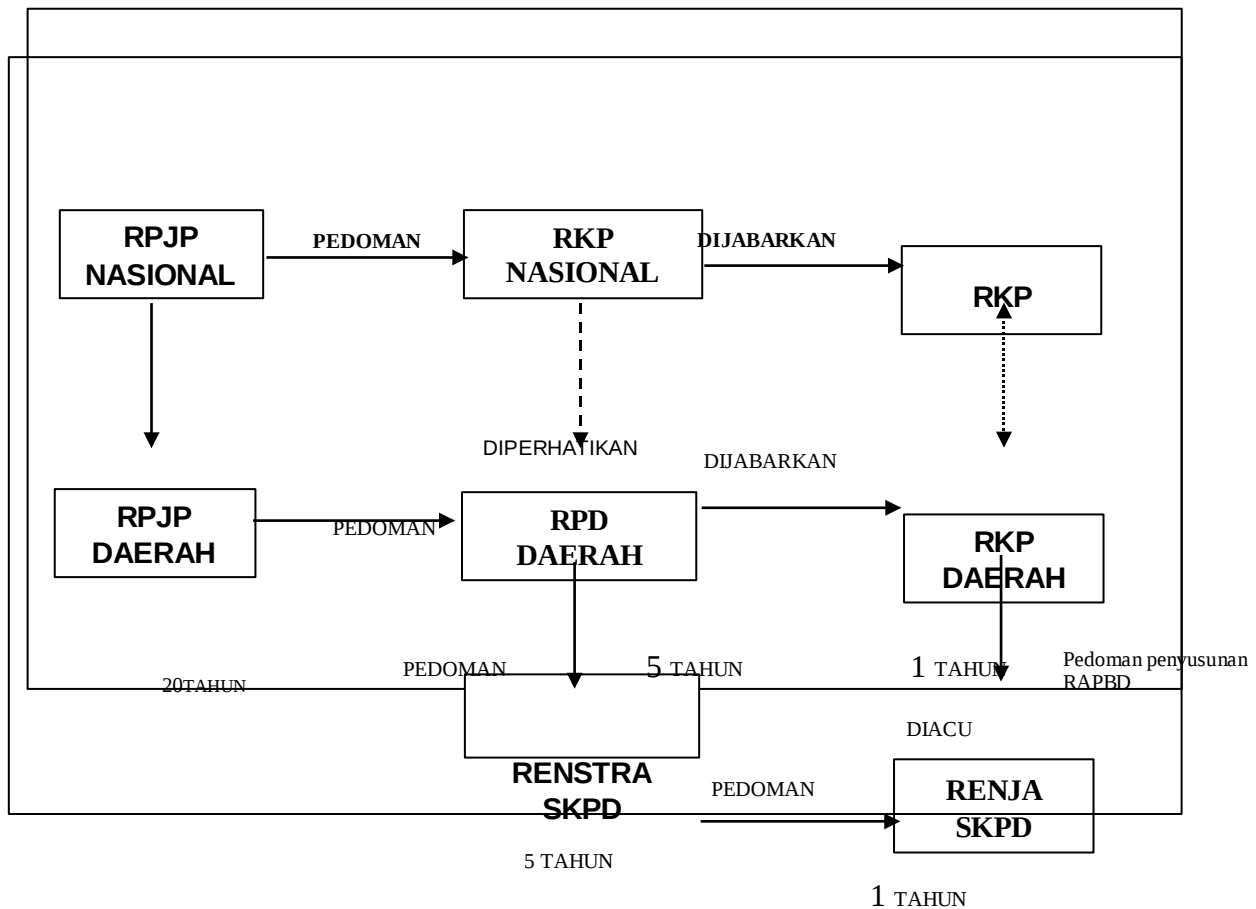
Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan rencana kerja SKPD tahun 2025 adalah :

- a) Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah :
- b) Adanya Penambahan Dan Pengurangan Kegiatan:
- c) Adanya Pergeseran Pergeseran Anggaran Antar Kegiatan, Program Maupun Antara Jenis Belanja.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan rencana kerja Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Surat keputusan menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan infentarisasi pemutahiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah :
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015-2035;

12. Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 9 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024- 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada perubahan RKPD 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

b) Tujuan

Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada II Triwulan terakhir tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Mengantisipasi Perkembangan Keadaan Yang Terjadi Pada Tahun Berjalan.
2. Menjadi Acuan Bagi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samapai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dengan Triwulan II.

Untuk mencapai target target indikator kinerja pada perangkat Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Adapun jumlah Program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 2 (dua) Program sudah termasuk Program rutin, sementara jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, dan jumlah subkegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) subkegiatan sudah termasuk sub kegiatan rutin, dengan alokasi dana belanja untuk tahun 2025 sebesar RP.3.712.498.900.’.

Adapun yang jumlah Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ini sebesar RP.1. 800.573.933,’atau sebesar 50 % dengan capaian rata rata kinerja sebesar 37 %.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sampai Triwulan II tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II
Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2024 s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		1500,00%		16
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																							
1	â€¢ Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Persepsi Korupsi	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			0	559.376.268		468.300.500	110	132.595.400	77	104.383.158	-	-	-	-	187	236.978.558	683	796.354.826	65,26%	57,34%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1,3		1.05.04.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			443	289.511.118	381	143.811.700	85	65.871.900	70	28.430.300	-	-	-	-	155	94.302.200	598	383.813.318	42,69%	52,43%	
1.3.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12	4.032.500	12	1.995.800			-	-					-	-	12	4.032.500	0,00%	0,00%	
1.3.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50	24.672.900	50	18.769.200	30	10.409.700,00	-	-					30	10.409.700	80	35.082.600	60,00%	55,46%	

1.3.3		1.05.04.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			16	10.670.800	16	3.040.200	5	Rp1.184.600,00	-	-					5	1.184.600	21	11.855.400	31,25%	38,96%	
1.3.4		1.05.04.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			50	17.500.000	50	4.470.500			50	4.470.500					50	4.470.500	100	21.970.500	100,00%	100,00%	
1.3.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			315	232.634.918	315	115.536.000	50	54.277.600,00	20	23.959.800					70	78.237.400	385	310.872.318	22,22%	67,72%	
1,4		1.05.04.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5	84.530.000	5	136.510.000	1	12.778.000	2	29.221.250	-	-	-	-	3	41.999.250	8	126.529.250	60,00%	21,31%	
1.4.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5	84.530.000	5	136.510.000	1	12.778.000,00	2	29.221.250					3	41.999.250	8	126.529.250	60,00%	30,77%	
1,6		1.05.04.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44	175.335.150		172.978.800	16	38.945.500	5	46.731.608	-	-	-	-	21	85.677.108	65	261.012.258	58,33%	55,61%	
1.6.1		1.05.04.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	10.000.000	12	8.340.000	8	6.000.000,00	-	-					8	6.000.000	20	16.000.000	66,67%	71,94%	
1.6.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	39.906.350	12	48.900.000	5	10.887.692,00	3	11.170.116					8	22.057.808	20	61.964.158	66,67%	45,11%	
1.6.3		1.05.04.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8	6.090.000			-	-	-	-					-	-	8	6.090.000			
1.6.4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	119.338.800	12	115.738.800	3	22.057.808,00	2	35.561.492					5	57.619.300	17	176.958.100	41,67%	49,78%	
1,7		1.05.04.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja			4	10.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	-	-	-	-	-	-	8	15.000.000	12	25.000.000	100,00%	100,00%	

1.7.1		1.05.04.1.1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000						2	5.000.000	4	10.000.000	100,00%	100,00%		
		1.05.01.2.01	penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					4	5.000.000	4	5.000.000						4	5.000.000	4	5.000.000	100,00%	100,00%		
1.7.2		1.05.04.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000						2	5.000.000	4	10.000.000	100,00%	100,00%		
Rata- Rata Capaian Kinerja																			65,26%						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi						
2	Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Persepsi Korupsi	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			0	1.284.625.500		1.621.275.600	10	301.794.100	10	452.791.600	-	-	-	-	20	754.585.700	50	2.039.211.200	86,11%	52,67%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya Pelatihan Dan Gladi Mekanisme Penanggulangan Bencana			17	1.193.228.200	12	1.559.280.000	4	272.538.000	5	424.691.700	-	-	-	-	9	697.229.700	26	1.890.457.900	75,00%	44,71%	
2.2.1		1.05.03.2.1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah warga yang mendapatkan kawasan untuk percegahan dan kesiapsiagaan			5	34.058.900										-	-	5	34.058.900				
2.2.2		1.05.03.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan			12	1.159.169.300	12	1.559.280.000	4	272.538.000,00	5	424.691.700					9	697.229.700	21	1.856.399.000	75,00%	44,71%	

				Mitigasi Bencana																					
2,3		1.05.03.3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	3. Jumlah Layanan Publik			12	66.716.300	12	58.186.000	5	28.656.100	5	28.099.900	-	-	-	-	10	56.756.000	22	123.472.300	83,33%	97,54%	
2.3.1			Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi respon cepat darurat bencana			12	66.716.300	12	58.186.000	5	28.656.100,00	5	28.099.900					10	56.756.000	22	123.472.300	83,33%	97,54%	
2,4		1.05.03.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kegiatan Hari Pahlawan			1	24.681.000	1	3.809.600	1	600.000	-	-	-	-	-	-	1	600.000	2	25.281.000	100,00%	15,75%	
2.4.1		1.05.03.4.1	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)			1	24.681.000	1	3.809.600	1	600.000,00	-	-					1	600.000	2	25.281.000	100,00%	15,75%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																				86,11%					
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu analisis dengan melibatkan seluruh Stake Holders melalui diskusi dua arah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam segi pelayanan, telah mengikuti dan melaksanakan surat edaran dari Instruksi Presiden Tentang Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seperti standar operasional penanganan penanggulangan bencana. Namun demikian kedepannya perlu peningkatan pelayanan OPD yang lebih profesional, sehingga terciptanya Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Lawas Utara yang Tangguh, Tanggap, dan Profesional.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (strengths)

- a. Tersedianya Pranata Hukum (Perda dan Surat Keputusan);
- b. Tersedianya Anggaran; dan
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia.

1.2. Kelemahan (weaknesses)

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. System Penanggulangan Bencana Daerah Yang Belum Optimal; dan
- c. Kurangnya Kemampuan Teknis Yang Dimiliki Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1. Kesempatan (opportunities)

- a. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat Untuk Menanggulangi Bencana;

- b. Keinginan Pengusaha Untuk Ikut Menanggulangi Dampak Bencana.

2.2. Ancaman (threats)

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencegahan Dini Bencana Daerah;
- b. Banyaknya Usaha Yang Mempengaruhi Daya Dukung Dan Daya Tampung Penanggulangan Bencana Yang Dapat Menimbulkan Bencana; Dan
- c. Adanya Kebijakan Teknis Dari Lintas Sektoral Yang Mempengaruhi Penanggulangan Bencana Daerah.

C. Factor-faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencegah dan menanggulangi bencana daerah dengan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait;
- c. Adanya system yang mengawasi akan terjadinya bencana ;
- d. Adanya dukungan masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.

Tugas pokok dan fungsi di setiap bidang kemudian akan diwujudkan dalam program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026.

Untuk SPM tahun 2025 memiliki dua kegiatan yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Bencana terdiri dari bencana alam dan non alam, bencana alam termasuk Banjir, Gempa Bumi, Longsor, Putting Beliung. Bencana non alam termasuk Teroris, Konflik Sosial, Wabah Penyakit. Bencana yang terjadi di Padang Lawas Utara Banjir, Longsor dan Putting Beliung. Upaya melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melatih SATGAS-BP (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana) sebanyak 74 orang dan membuat Peta

Rawan Bencana, buku KRB (Kajian Resiko Bencana). Serta melakukan sosialisasi terhadap pembuatan Peringatan bencana yang berbentuk Kentungan, Bedug. Sirine. Kegiatan ini memiliki target 10 kawasan (69.041 orang) dan yang telah terealisasi masih belum ada dikarenakan masih ditahap perencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dilaksanakan sesuai SOP (Setandart Opsional Pelayanan) terhadap korban yang berdampak bencana. Dalam Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana dibutuhkan Sarana Prasarana yang memadai termasuk kebutuhan anggaran. Target untuk kegiatan ini 100 %, bencana yang akan datang tidak bisa di ukur berapa yang akan datang namun semua bencana yang akan datang akan di tangani sesuai SOP Yang berlaku. Ditahun 2025 bencana yang terjadi masih satu kejadian yang sudah telah ditangani.

Sedangkan Kinerja Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencanan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD priode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan OPD, dan / atau indikator lainnya sebagai berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2020 – 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisa
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Resiko Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	153.221	0	0				
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	68.507	74	0				
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	100	1				

BAB III.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas, dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2021-2026, isu-isu penting pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai antara lain pencapaian target ekonomi, sosial, lingkungan hidup, tata kelola dan politik hukum keamanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Pendapatan Perkapita
- c. Pemerataan Pembangunan
- d. Pengentasan Kemiskinan
- e. Kelanjutan Pembangunan
- f. Peningkatan Daya Saing
- g. Inovasi Teknologi
- h. SDM Berkualitas
- i. Resiliensi Berbasis Swakarsa

B. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025, dimana tujuan pembangunan jangka panjang daerah adalah:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
- b. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas

- c. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maju
- d. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

A. Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas pengendalian dampak lingkungan dengan baik, untuk itu Pemerintahann padang lawas utara menetapkan tujuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:“ ***Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang Penanggulangan Bencana Daerah***”

Untuk mencapai tujuan tersebut ada tujuan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

“Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Mencakup Penanganan Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana. ”.

Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode Tiga tahun ke depan.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Daerah. Sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1. Membantu masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani***

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

NO	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6
		Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69.87
				Nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	80
		Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.	Membantu masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Presentase Penanggulangan Bencana yang Di Tangani	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghadapi bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut disajikan Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah
- 3) Administrasi umum perangkat daerah
- 4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- 5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

II. Program Penanggulangan bencana

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 4) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PADANG LAWAS UTARA																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025	TAHUN 2025				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
								CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												
								PAGU INDIKATIF (Rp)												
		KEGIATAN	KEGIATAN	OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10- 12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00								6.269.428.697,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00								6.269.428.697,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00								6.269.428.697,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG terdapatnya program						3	3	2.040.636.561,00	2.207.455.588,00	1.951.223.760,00	2.325.948.427,00						4.366.584.988,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				Dokumen Dokumen													
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				8 Dokumen	8	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		25.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		10.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		5.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		10.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14 Laporan	14	1.409.600.961,00	1.426.447.588,00	1.387.923.260,00	-21.677.701,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PEGAWAI ASN	2.075.441.972,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b	12	1.409.600.961,00	1.426.447.588,00	1.387.923.260,00	-21.677.701,00	Kab. Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1.971.341.972,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		99.100.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0005																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE RENJANA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
													NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
													16	17		19	20		
KEGIATAN				OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI 14	SUMBER DANA 15	16	17	18	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		23.143.016,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				381 jenis	381 jenis	246.606.800,00	262.674.200,00	203.811.700,00	-42.795.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA	338.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1.995.800,00	1.995.800,00	4.125.300,00	2.129.500,00 Padang	Kab. Sawahlau, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi Berbasis antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan		50.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	19.603.000,00	35.671.000,00	76.639.700,00	57.036.700,00 Padang	Kab. Sawahlau, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		20.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	9.019.000,00	9.018.400,00	3.040.200,00	-5.978.800,00 Padang	Kab. Sawahlau, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		6.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	4.470.500,00	-13.029.500,00 Padang	Kab. Sawahlau, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		12.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				315 Laporan	315 Laporan	198.489.000,00	198.489.000,00	115.536.000,00	-82.953.000,00 Padang	Kab. Sawahlau, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		250.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah	jumlah laporan Jasa Penunjang				36 Laporan	36	287.818.800,00	316.723.800,00	172.978.800,00	-114.840.000,00			Memperkuat penyelarasan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA	1.855.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		5.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa						48.900.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	Kab. Padang Komunikasi,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pelaksanaan	S u m b a	50.000.000,00	BADAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM SEDULAH		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.999.900,00	49.999.600,00	3.809.600,00	-31.190.300,00 Padang	Kab. Sawahlau Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi Berbasis antarumat beragama untuk masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			50.000.000,00 PENANGGU	BADAN LANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								3.743.153.661,00	4.184.971.488,00	3.712.498.960,00	-30.654.701,00							6.269.428.697,00	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2025 pada dasarnya akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara melalui kebijakan pembangunan. Adapun dalam perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini belum dapat mengakomodir semua kebutuhan ideal yang dibutuhkan BPBD, terutama dalam hal kebutuhan sarana dan prasarana pendukung Bencana serta optimalisasi pemenuhan semua sub-kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi misi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradat.

Gunung Tua, 28 JULI 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.198110092000121002